

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dimana pengelolanya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Penyimpan Barang merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan pertanggungjawaban yang meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga terciptanya sistem pengelolaan barang yang fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Penyajian pengelolaan barang yang dimiliki pemerintah agar dapat digunakan sesuai fungsi dan peranannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Hal ini dapat didukung dengan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dalam proses pengelolaan barang milik daerah yang berfungsi memudahkan penyimpan barang (bendaharawan barang) SKPD dalam menghasilkan laporan-laporan yang

berkaitan dengan data-data tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal diatas, dalam rangka mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tersebut maka dibuatlah suatu rancangan analisa sistem informasi mengenai pengelolaan barang milik daerah oleh penyimpan barang (bendaharawan barang) pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, pencatatan dan pelaporan pada Dinas Kesehatan selaku pengelola barang menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Permasalahan yang sering dijumpai penyimpan barang (bendaharawan barang) dalam pengelolaan laporan data barang milik daerah ini, antara lain adalah masalah penatausahaan yang kurang efektif dan efisien. Banyaknya jenis pencatatan pembukuan dan laporan penyimpan barang (bendaharawan barang) yang harus disediakan membuat pekerjaan menjadi tumpang tindih sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Demikian juga untuk tingkat kesalahannya, dengan dilakukan secara manual maka kemungkinan kesalahan yang dilakukan menjadi lebih besar. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang terintegrasi sehingga tercipta sistem pengelolaan barang milik daerah yang fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai.

1.3 Batasan masalah

Dalam penulisan ini permasalahan hanya memfokuskan pada pengelolaan barang milik daerah oleh penyimpan barang (bendaharawan barang) pada ruang lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hanya menitikberatkan pada masalah tugas penatausahaan dan tanggungjawab penyimpan barang (bendaharawan barang) dalam menyiapkan pembukuan dan pelaporan yang meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah antara bendaharawan barang dengan pengurus barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan penulis tidak membahas masalah barang/jasa yang bersifat pemeliharaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan ini adalah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah oleh penyimpan barang (bendaharawan barang) dalam suatu sistem yang terintegrasi sehingga barang milik daerah dapat dikelola secara tertib, sesuai peraturan perundang-undangan, efisien, transparan, dan bertanggungjawab.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis melakukan pengumpulan bahan yang diperlukan untuk menganalisa dari sistem yang sedang berjalan. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

1) *Interview* (Wawancara)

Melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan alur permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan penulisan yang mungkin lepas dari pengamatan.

2) *Observasi* (Penelitian Lapangan)

Dengan melakukan pengamatan langsung dan meninjau langsung terhadap pelaksanaan proses pengelolaan barang milik daerah oleh

penyimpan barang (bendaharawan barang) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3) Study Pustaka

Dilakukan dengan mengumpulkan data dengan informasi melalui buku-buku, dan bahan-bahan pelengkap lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan Makalah ini.

b. Analisa Sistem

Diuraikan mengenai analisa dari sistem pengelolaan barang milik daerah oleh penyimpan barang (bendaharawan barang) yang akan dibangun meliputi identifikasi masalah, prinsip kerja sistem lama, analisis sistem serta hasil dari analisis tersebut.

c. Perancangan Sistem

Membahas perancangan serta pembangunan software aplikasi sistem informasi pengelolaan barang milik daerah oleh penyimpan barang (bendaharawan barang) . perancangan dimulai dari perancangan proses dan perancangan basis data.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan tugas akhir ini dapat dijelaskan secara terurai dengan baik, maka penulisan ini perlu disusun secara terstruktur dan sistematis. Adapun sistematis penulisan yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dalam pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan sistem pengelolaan barang milik daerah oleh penyimpan barang (Bendaharawan Barang) yang akan dibangun meliputi identifikasi masalah, prinsip kerja sistem lama, analisis sistem, serta hasil dari analisis tersebut.

Bab ini merupakan bab yang membahas perancangan serta pembangunan software aplikasi sistem informasi pengelolaan barang milik daerah oleh pengelola barang (Bendaharwan Barang). Perancangan dimulai dari perancangan proses dan perancangan basis data.

BAB III ANALIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan organisasi, analisa proses, analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, usecase diagram, dan deskripsi usecase.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan implementasi sitem mulai dari perangkat keras, perangkat lunak serta implementasi basis data

BAB V PENUTUP

Bab ini berupa uraian kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis.